
**ANALISIS ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN****Elsa Fitri Amran**

elsafitriamran@gmail.com

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SUMBAR

Yesi Novita Sari

yesinovitasar405@gmail.com

Abstract

The research was conducted at the Education and Culture Office of Padang Pariaman Regency which is a local government agency that carries out some of the Government's affairs in the field of education and culture. The purpose of this study is to determine the conformity of the Government's financial statements on the Education and Culture Office of Padang Pariaman Regency already with Government Regulation Law number 24 in 2005 on government accounting standards, analyzing financial statements using efficiency ratios, independence ratios, budget growth ratios, analyzing internal control systems in the process of preparing financial reports, analyzing the quality of human resources and educational background of civil states apparatus and employees as financial managers in the process of preparing reports finance in the Education and Culture Office of Padang Pariaman Regency. The method used in this study is by library study method and field research with related officials, after which the data has been collected is analyzed descriptively that comparing the actual situation with relevant theories, in order to obtain the results of research for the problems encountered related with the implementation of government financial reporting on Education and Culture Office of Padang Pariaman Regency. From the data analysis conducted, obtained the result that the government's financial report on the Education and Culture Office of Padang Pariaman Regency Already in accordance with Government Regulation number 24 in 2005; The efficiency ratio of the Education and Culture Office of Padang Pariaman Regency in 2016 is in efficient condition with the percentage ratio of 95.32%. The 2016 independence ratio is in the pattern of delegative relations. The 2016 budget growth ratio was positive growth with a 10% increase. Internal Control System has been done well with data integrity and documents or archives that have been stored well, the evaluation of the economy, efficiency, and effectiveness has been in accordance with the set targets. The quality of human resources at the Department of Education and Culture is good, civil states apparatus / Employees have skill and work experience long enough.

Keywords: Financial Statement, Efficiency Ratio, Independence Ratio, Budget Growth Ratio, Human Resources, Internal Control System

DOI: <https://doi.org/10.30985/ji.v1i1.4>

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author and Indonesian Indovisi Institute (III).

A. PENDAHULUAN

Instansi Pemerintah secara umum berperan dalam pemberian layanan kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya masing-masing baik di tingkat pusat, daerah, kota serta kabupaten. Misalnya rumah sakit, lembaga pendidikan formal, dapertemen, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di daerah maupun kota, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan pelayanan, instansi pemerintah membutuhkan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan dalam APBN bersumber dari penerimaan pajak (pajak dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional), penerimaan bukan pajak (dari SDA, bagian pemerintah atas laba BUMN, maupun lainnya), dan penerimaan hibah. Sumber penerimaan tersebut berasal dari masyarakat sehingga sudah seharusnya pemerintah mempertanggung jawabkannya kepada masyarakat.

Sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat atau publik atas anggaran yang diterimanya, setiap OPD diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan. Hal ini sebagaimana dimuat dalam undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 9 huruf e yang terkait dengan tugas-tugas Kementerian Negara/ Lembaga sebagai pengguna anggaran/ barang. Tugas-tugas tersebut adalah sebagai berikut : menyusun rencana anggaran laporan keuangan yang dipimpinnya, menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, menyusun anggaran laporan keuangan, mengelola barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang dipimpinnya.

Penyusunan laporan keuangan pemerintah mengacu pada peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Perbaharuan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya Departemen Keuangan membuat suatu aplikasi yang disebut sistem Akuntansi Instansi (SAI) Untuk mempermudah penyusunan Laporan Keuangan di instansi pemerintah.

Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang salah satunya adalah melaksanakan perencanaan anggaran, pelayanan, pengawasan kinerja ASN, keuangan, dan administrasi di bidang pendidikan dan kebudayaan, serta sebagai pengawas terhadap kegiatan UPT dan laporan keuangannya. Kondisi setiap OPD yang tidak seragam juga berpengaruh menimbulkan keberagaman kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Kawedar (2009) menyatakan, bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah maka diperlukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan hasil pra penelitian ke lapangan, hasil wawancara dengan Kasubag Keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) opini BPK untuk Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang tetap sama sejak tahun 2015. Menurut pernyataan Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman, Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun Anggaran Per 31 Desember 2016, mendapatkan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Daerah (BPK) adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan pada tahun anggaran tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman, Anggaran yang diberikan pemerintah belum sepenuhnya terealisasi hanya 95,32% saja yang dapat terealisasikan, dan belum memenuhi 100% realisasi anggaran.

Dalam proses pelaporan keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman sering muncul permasalahan, dimana ada Sekretaris yang membawahi tiga subagian, yaitu subagian Keuangan, Subbagian Umum dan BMD, Subagian Kepegawaian, dimana tiga subbagian tersebut mempunyai kegiatan masing-masing, yang akan melaporkan kegiatannya dalam bentuk laporan Surat PertanggungJawaban (SPJ), serta banyaknya bidang yang dikelola di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman. Permasalahan yang di jumpai pada sistem intern, ketika terjadinya sebuah perubahan susunan perangkat organisasi, terjadinya mutasi penggantian pimpinan, kasubag, maupun staf sehingga mempersulit proses pelaporan keuangan yang harus segera diselesaikan, dan keterlambatan oleh setiap bidang dan UPT (unit pelaksana teknis) dalam melaporkan SPJ kegiatannya dalam laporan keuangan kepada sub bagian keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman, karena keterlambatan SPJ tersebut membuat penyerapan dana menjadi lambat dan sedikit, sehingga kemungkinan terjadi pengendapan uang di kas pemerintahan daerah, khususnya OPD (Organisasi perangkat daerah) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman, sehingga menimbulkan permasalahan seperti Pengurangan Anggaran yang akan diberikan untuk tahun selanjutnya. Dalam hal ini berarti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman masih terjadi hambatan dalam melaksanakan proses pelaporan keuangan. Hambatan tersebut salah satunya kemungkinan dipengaruhi dari kapasitas sistem pengendalian internal, dan adanya kelemahan pada sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menjalankan tugas. Dimana dapat dilihat dari kurang memadainya kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan dalam sistem penyusunan laporan keuangan, karena dilatar belakangi oleh pendidikan SDM yang tidak seragam, selain sumber daya manusia (SDM), keragaman kondisi yang dihadapi oleh UPT yang ada di Kecamatan adalah sumber daya manusia (SDM) karyawan yang ada di UPT, maupun komitmen pimpinannya yang berpengaruh pada kualitas laporan keuangan.

Oleh karena itu, sampai saat ini para akademis dibidang akuntansi masih lebih fokus pada pelaporan keuangan perusahaan, dan minim mengupas masalah pelaporan keuangan pemerintah serta permasalahan yang ada didalamnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dipandang perlu untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan analisis pelaporan keuangan khususnya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman. Maka, rumusan masalah untuk penelitian ini adalah :

1. Apakah Penyajian Laporan Kuangan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman sudah sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tetang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)?
2. Bagaimana Analisis Laporan Keuangan dengan menggunakan Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian, Rasio Petumbuhan Anggaran?
3. Bagaimana sistem pengendalian intern dalam proses pembuatan laporan keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman?
4. Bagaimana dengan Kualitas SDM dan latar belakang pendidikan ASN dan karyawan sebagai pengelola keuangan dalam proses penyusunan laporan keuangan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman?

Akuntansi pemerintah adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga yang tidak mencari laba. Walaupun lembaga pemerintah senantiasa berukuran besar, namun sebagaimana perusahaan yang tergolong sebagai lembaga

mikro, sehingga akuntansi pemerintah sebagaimana akuntansi perusahaan, digolongkan pula sebagai akuntansi mikro.

Akuntansi pemerintahan didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta (Bastian, 2005).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut PSAP

Komponen-komponen yang terdapat dalam laporan keuangan pokok pemerintah adalah:

a. Laporan Realisasi Anggaran APBD

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. Dalam modul Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAP) No. 2 tentang laporan realisasi anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan dan menggambarkan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan unsur yang dicakup dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari (1). Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemda, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemda, (2). Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh Pemda, (3). Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemda terutama dimaksudkan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran

b. Laporan Posisi Keuangan / Neraca

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 01 Paragraf 38 dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 menjelaskan bahwa neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana pada periode tertentu. Neraca merupakan laporan yang memberikan gambaran utuh suatu entitas (Pemerintah Daerah) pada suatu titik waktu. Dalam neraca akan tergambar elemen-elemen yang menyusun

entitas tersebut, sehingga neraca sering disebut sebagai potret posisi keuangan suatu entitas. Dalam neraca akan tergambar elemen-elemen yang menyusun entitas.

c. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi menyajikan hubungan antara penghasilan dan beban dari entitas. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran lain, seperti tingkat pengembalian investasi atau laba per saham. Unsur-unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait dengan pengukuran laba adalah penghasilan dan beban. Laporan laba rugi menimal mencakup pos-pos sebagai berikut: pendapatan, beban keuangan, bagian laba rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas, beban pajak, laba atau rugi neto.

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Dalam laporan ini menunjukkan:

- Seluruh perubahan dalam ekuitas untuk satu periode, termasuk di dalamnya pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut.
- Perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik termasuk jumlah investasi, perhitungan dividen dan distribusi lain kepemilikan termasuk jumlah investasi, perhitungan dividen dan distribusi lain kepemilikan ekuitas selama satu periode.

e. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah arus masuk, arus keluar kas dan setara kas pada bendahara umum daerah. Penyajian laporan arus kas adalah untuk menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi asset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran (Tanjung, 2006).

f. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Untuk tujuan umum, setiap arus kas harus mempunyai referensi silang dalam catatan atas laporan keuangan (Tanjung, 2006). Catatan atas laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Oleh karena itu, laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus di buat catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislative, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan peminjaman serta pemerintah.

Tujuan pelaporan keuangan pemerintah secara khusus adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan:

- Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan pemerintahan
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah
- Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
- Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya
- Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
- Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintahan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
- Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Rasio Efisiensi

Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah dituntut untuk bisa melaksanakan setiap kegiatan dengan efisien. Untuk mengetahui suatu kegiatan pemerintah apakah sudah terlaksana dengan efisien atau tidak, maka bisa dilihat dari rasio efisiensi. Mardiasmo (2004) mengatakan bahwa: *“Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi”*.

Rasio Kemandirian

Keberhasilan kemampuan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) salah satunya dilihat dari kemandirian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut. Suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah mandiri dalam aspek keuangan diharapkan bisa melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengharapkan transfer dana bantuan atau pinjaman dari pemerintah pusat maupun pihak Bank maupun non Bank. Rasio kemandirian keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan anggaran dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dana bantuan tau pinjaman dari pemerintah pusat maupun pihak Bank maupun non Bank. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Mahmudi, 2010)

Rasio Pertumbuhan Anggaran

Rasio pertumbuhan anggaran mengukur seberapa besar kemampuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

Sistem Pengendalian Intern

Menurut Wilopo (2006) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) meliputi berbagai kebijakan dan prosedur :

- a. terkait dengan catatan keuangan

- b. menyediakan keyakinan yang memadai bahwa laporan tersebut telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan penerimaan serta pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi yang diberikan
- c. menyediakan keyakinan yang memadai atas keamanan aset daerah yang berdampak material pada laporan keuangan.

Keberhasilan SPIP tidak hanya bertumpu pada rancangan pengendalian yang memadai untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi, tetapi juga kepada setiap orang dalam organisasi sebagai faktor yang dapat membuat pengendalian tersebut berfungsi.

Sumber Daya Manusia

Menurut Syafarudin (2008), kualitas sumber daya manusia adalah sebagai kunci keunggulan kompetitif bagi organisasi, membentuk kompetensi-kompetensi dan komitmen pegawai baik secara individu atau kelompok guna memenuhi kebutuhan organisasi dan mengintegrasikan kompetensi-kompetensi tersebut dalam sistem manajemen yang dijalankan organisasi. Kualitas dan karakteristik pegawai yang diperlukan oleh organisasi pada hakikatnya tidak terlepas dari tantangan-tantangan bersaing yang akan dihadapi oleh organisasi sekarang maupun di masa yang akan datang.

Menurut Nawawi dalam Sedarmayanti (2007) mengatakan ada tiga pengertian sumber daya manusia, yaitu

- a. Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan)
- b. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.
- c. Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan asset dan berfungsi sebagai modal (*non material/ non financial*) di dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata (riil) secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

B. METODE PENELITIAN

Objek Penelitian ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman dengan jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif. Menurut Kuncoro (2001) "Metode kuantitatif adalah pendekatan ilmiah terhadap pengambilan keputusan manajerial dan ekonomi. Dimana pendekatan ini terdiri atas perumusan masalah, menyusun model, mendapatkan data, mencari solusi, menguji solusi, menganalisis dan mengimplementasikan hasil". Menurut Strauss dan Corbin (1998) yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistic atau cara-cara lain dari kuantifikasi. Salah satu alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman para peneliti dimana metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan. Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur sipil negara dan Karyawan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman dan Laporan Keuangan Per 31 Desember 2016.

Jenis dan Sumber Data Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer diperoleh dengan wawancara langsung yang dilakukan kepada subagian Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman. Data Primer ini bertujuan untuk mengetahui informasi apakah Pelaporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Sudah sesuai dengan peraturan pemerintah No 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data secara langsung diperoleh dari sumbernya. Data Sekunder dalam penelitian ini adalah Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Posisi Keuangan / Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, data Aparatur Sipil negara (ASN) dan Karyawan, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman 2017.

Metode yang digunakan untuk menganalisa adalah Metode Deskriptif. Metode Deskriptif adalah mengumpulkan, mengklarifikasikan, menganalisa dan menginterpretasikan data-data yang diperoleh dari objek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas sesuai keadaan sebenarnya

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis data yang dipakai adalah pendekatan deskriptif, yakni analisis dengan membandingkan teori dengan kenyataan atau praktek tentang kesesuaian pelaporan keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman dengan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP). Analisis deskriptif ini memberikan gambaran secara menyeluruh tentang Pelaporan Keuangan yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman telah sesuai dengan sebagaimana mestinya.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengumpulan Data Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumentasi.
2. Reduksi Data Reduksi data dilakukan dalam rangka pemilihan dan penyederhanaan data. Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini adalah seleksi data dan pembuangan data yang tidak relevan. Data-data yang relevan dengan penelitian akan diorganisasikan sehingga terbentuk sekumpulan data yang dapat memberi informasi faktual.
3. Penyajian Data Penyajian data dilakukan dalam bentuk sekumpulan informasi, baik berupa tabel, bagan, maupun deskriptif naratif, sehingga data yang tersaji relatif jelas dan informatif. Tindakan lanjutan, penyajian data digunakan dalam kerangka menarik kesimpulan dari akhir sebuah tindakan.

Analisis Terhadap Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005

Proses akuntansi keuangan daerah umumnya terdiri dari tahap pencatatan, penggolongan dan tahap pelaporan. Di setiap Organisasi Perangkat Daerah OPD khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman yang dibantu oleh *software*

yang disebut SIMDA dimana sistem pencatatannya masih berbasis CTA sesuai PP No. 24 Tahun 2005. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman hanya menyajikan 3 (tiga) laporan keuangan yaitu Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Posisi Keuangan/Neraca, dan Laporan Realisasi Anggaran untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pembahasan Kesesuaian Laporan Realisasi Anggaran dengan PP. No 24 Tahun 2005 tentang SAP

Laporan realisasi anggaran di klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dinas pemerintah tingkat provinsi/ kabupaten /kota, dan lembaga teknis daerah provinsi / kabupaten / kota. (*PP. No 24 Tahun 2005 tentang SAP*).

Dari laporan Realisasi Anggaran yang disajikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman, Laporan realisasi anggaran menyajikan:

- a. Belanja Operasi
- b. Belanja Modal
- c. Surplus / Defisit

Dari laporan Realisasi Anggaran yang disajikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman, Laporan realisasi anggaran tidak menyajikan akun pendapatan.

Laporan realisasi anggaran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman hanya menyajikan akun belanja operasional dan akun belanja modal, dikarenakan dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 mengklasifikasikan belanja menurut organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dinas pemerintah tingkat provinsi/ kabupaten /kota, dan lembaga teknis daerah provinsi / kabupaten / kota. Akun Pendapatan dan Pendapatan transfer hanya di sajikan dalam laporan keuangan pemerintahan daerah kabupaten padang pariaman, karena dinas pendidikan tidak mendapatkan pendapatan dari pajak daerah maupun retribusi daerah secara langsung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diberikan anggaran langsung oleh Pemerintahan Daerah yang digunakan untuk belanja modal Operasi dan belanja modal saja.

Berdasarkan dari Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016 dapat dijelaskan bahwa Anggaran yang diberikan Pemerintah hanya 95,32% yang terealisasi, hal ini terjadi akibat dari ada kegiatan yang termasuk kedalam belanja Aset Tetap lainnya yang hanya terealisasi sebesar 14,25% saja. Sehingga anggaran yang diberikan pemerintahan tidak dapat terealisasi sebesar 100%.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan sudah dapat dikatakan relevan informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan dapat mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Laporan yang diterbitkan harus andal dan disajikan secara jujur, dapat diverifikasi dan netral, serta dapat dibandingkan dengan laporan lainnya. Dari laporan Realisasi Anggaran yang disajikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman, Laporan realisasi anggaran

sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan.

Laporan Posisi Keuangan /Neraca

Laporan posisi keuangan/neraca memberikan gambaran utuh suatu entitas (Pemerintah Daerah) pada suatu titik waktu. Dalam neraca akan tergambar elemen-elemen yang menyusun entitas tersebut, sehingga neraca sering disebut sebagai potret posisi keuangan suatu entitas. Dalam neraca akan tergambar elemen-elemen yang menyusun entitas tersebut yang tersaji pada Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Lampiran IIIB tentang penyajian neraca Pemerintah Propinsi, Kabupaten, dan Kota.

Kesesuaian Laporan Neraca dengan PP. No 24 Tahun 2005 tentang SAP

Laporan Neraca Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2016

Laporan Neraca Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mencantumkan pos-pos berikut:

- a) kas dan setara kas
- b) investasi jangka pendek
- c) piutang pajak dan bukan pajak
- d) persediaan
- e) investasi jangka panjang
- f) aset tetap
- g) kewajiban jangka pendek
- h) ekuitas dana.

Dari laporan neraca yang disajikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman, Laporan neraca tidak menyajikan :

- a) Kewajiban jangka panjang

Dinas Pendidikan dan kebudayaan tidak menyajikan pos kewajiban jangka panjang karena dinas pendidikan dan kebudayaan tidak memiliki hutang jangka panjang, dikarenakan dinas pendidikan dan kebudayaan tidak mempunyai utang dalam negeri-lembaga keuangan bank, maupun non bank, sehingga kewajiban jangka panjang tidak disajikan dalam laporan neraca Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman.

Dari laporan neraca yang disajikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman, ditemukan adanya kas dibendahara pengeluaran sebesar Rp. 5.000.000.00, dimana hal ini disebabkan dari kesibukan sistem pada akhir tahun, sehingga dana tersebut tidak dapat dicairkan oleh bendahara pengeluaran, sehingga harus dicairkan pada awal tahun 2017.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005, penyusunan laporan keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005.

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi menyajikan hubungan antara penghasilan dan beban dari entitas. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran lain, seperti tingkat pengembalian investasi atau laba per saham. Unsur-unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait dengan pengukuran laba adalah penghasilan dan beban. Laporan laba rugi menimal mencakup pos-pos sebagai berikut: pendapatan, beban keuangan, bagian laba rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas, beban pajak, laba atau rugi neto.

Peneliti tidak melakukan penelitian terhadap Laporan laba rugi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman, karena sumber data yang terbatas yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman.

Laporan Perubahan Ekuitas

Seluruh perubahan dalam ekuitas untuk satu periode, termasuk di dalamnya pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut.

Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menggambarkan perubahan posisi kas dalam satu periode akuntansi. Di dalam laporan ini perubahan posisi kas akan dilihat dari tiga sisi yaitu dari kegiatan operasi, pendanaan dan investasi. Peneliti tidak melakukan penelitian terhadap Laporan arus kas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman, karena sumber data yang terbatas yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman.

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya.

Peneliti tidak melakukan penelitian terhadap catatan atas laporan keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman, karena sumber data yang terbatas yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman.

Rasio Efisien

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dibelanjakan dengan anggaran yang diterima, berdasarkan data laporan realisasi anggaran, maka penulis jelaskan rasio efisiensi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut :

Rasio Efisiensi Tahun 2016:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{jumlah belanja}}{\text{anggaran}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{545,809,776,117.00}{572,605,652,433.67} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = 95,32 \%$$

Rasio efisiensi tahun 2016 sebesar 95,32% menunjukkan bahwa jumlah anggaran yang diterima Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman lebih besar dibandingkan dengan jumlah belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman, sehingga rasio efisiensi tahun 2016 berada dalam kondisi efisiensi.

Rasio Kemandiriaan

Rasio efisiensi menunjukkan kemampuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariman dalam membiayai sendiri kegiatan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, berdasarkan data laporan realisasi anggaran maka penulis jelaskan rasio kemandirian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut :

Rasio Kemandirian Tahun 2016:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Anggaran Dinas}}{\text{Bantuan /pinjaman}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{572,605,652,433.67}{0} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian = Tak Terhingga

Rasio Kemandirian tahun 2016 sebesar tak terhingga menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman sudah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan pekerjaannya sehingga dikategorikan dalam pola hubungan delegatif.

Rasio Pertumbuhan Anggaran

Rasio Pertumbuhan Anggaran mengukur seberapa besar kemampuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya, berdasarkan data laporan realisasi anggaran maka penulis jelaskan rasio Pertumbuhan Anggaran Dinas Pendidikan dan kebudayaan sebagai berikut :

Rasio Pertumbuhan Anggaran Tahun 2016:

Rasio Pertumbuhan Anggaran

$$= \frac{\text{realisasi anggaran}}{\square \text{ealisasi anggaran}} \times 100\%$$

Rasio Pertumbuhan Anggaran

$$= \frac{545,809,776,117.00}{545,809,776,117.00} \times 100\%$$

Rasio Pertumbuhan Anggaran = 10 %

Rasio Pertumbuhan Anggaran tahun 2016 sebesar 10% menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan anggaran yang positif pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman dikarenakan adanya peningkatan jumlah anggaran tahun 2016 dibandingkan jumlah anggaran yang tereliasasi tahun 2015.

Analisis Sistem Pengendalian Intern

Berdasarkan hasil Penelitian langsung peneliti dengan cara wawancara, peneliti mewawancarai Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman. Pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman sudah dilakukan dengan baik dengan Integritas data dan dokumen maupun arsip sudah tersimpan dengan baik, adanya evaluasi terhadap ekonomi, efisiensi, dan efektivitas telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Serta sudah dilakukan Perbaikan terhadap kualitas pengendalian sistem internal terhadap masalah yang timbul dalam Pelaporan Keuangan setiap tahunnya

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai Struktur organisasi dan uraian tugas pegawai instansi pemerintah secara tertulis yang menggambarkan pembagian kewenangan dan pemisahan tugas yang jelas sesuai dengan Tupoksi dan sudah menerapkan PP No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah terdiri dari lima unsur, Lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi dan pemantuan.

Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia

Jumlah ASN/ Karyawan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 75 orang, Tingkat Pendidikan sebagian besar ASN/ Karyawan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman untuk tamatan SMA, yaitu sebanyak 14 Orang atau 5,4% , dengan 94% yang S1 dan S2. Dengan latar belakang pendidikan yang berbeda yaitu, sarjana ekonomi, sarjana pendidikan dan sarjana hukum. Namun kualitas Sumber daya manusia pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah baik, dikarenakan ASN/ Karyawan mempunyai skil dan pengalaman kerja yang cukup lama.

Pengelola keuangan (ASN/ Karyawan) OPD (Organisasi Perangkat Daerah) memahami tugas pokok fungsi sebagai Pengguna Anggaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan dengan baik. Pengelola Keuangan (ASN/ Karyawan) mengetahui dan memahami peraturan- peraturan keuangan yang terkait dengan laporan keuangan, Pengelola Keuangan (ASN/ Karyawan) memiliki kemampuan dalam berinteraksi dengan sistem, mengikuti dan menguasai perkembangan aplikasi yang ada.

Namun Pengelola Keuangan (ASN/ Karyawan) jarang mengikuti Pelatihan-pelatihan atau Bimtek keuangan atau akuntansi dalam meningkatkan kemampuan bekerja, serta sering terjadi mutasi dan Rotasi atau perputaran posisi kerja pengelolaan keuangan sehingga penempatan karyawan tidak tepat atau tidak sesuai dengan bidangnya, maka diperlukan menempatkan pegawai sesuai dengan bidangnya dan Latar Pendidikan yang tidak seragam tidak mempengaruhi terhadap kualitas laporan keuangan yang di sajikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Laporan pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, laporan perubahan ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan tersebut sudah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, namun pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hanya memberikan data laporan Realisasi Anggaran, laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Neraca/ Laporan Posisi keuangan yang sudah sesuai dengan peraturan pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah.
2. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Karena setiap pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan seluruh kegiatan yang dilakukan serta hasil yang dicapai secara sistematis dan terstruktur untuk kepentingannya.
3. Rasio Efisiensi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman, dengan rasio efisiensi menunjukkan jumlah anggaran yang diterima Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman lebih besar dibandingkan dengan jumlah belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman, dengan persentase rasio 95,32% yang menunjukkan rasio efisiensi untuk tahun 2016 dalam keadaan efisien.
4. Rasio Kemandirian
Rasio Kemandirian tahun 2016 sebesar tak terhingga menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman sudah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan pekerjaannya sehingga dikategorikan dalam pola hubungan delegatif atau kemampuan keuangan yang tinggi.
5. Rasio Pertumbuhan Anggaran
Rasio Pertumbuhan Anggaran tahun 2016 sebesar 10% menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan anggaran yang positif pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman dikarenakan adanya peningkatan jumlah anggaran tahun 2016 dibandingkan jumlah anggaran yang tereliasasi tahun 2015.
6. Sistem Pengendalian Intern
Sistem Pengendalian Intern untuk Pengelola keuangan yang dilaksanakan oleh OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman sudah dilakukan dengan baik dengan Integritas data dan dokumen maupun arsip sudah tersimpan dengan baik, adanya evaluasi terhadap ekonomi, efisiensi, dan efektivitas telah sesuai dengan target yang ditetapkan
7. Sumber Daya Manusia
Kualitas Sumber daya manusia pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah baik, dikarenakan ASN/ Karyawan mempunyai skill dan pengalaman kerja yang cukup lama. dan Latar Pendidikan yang tidak seragam tidak mempengaruhi terhadap kualitas laporan keuangan yang di sajikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman

Dari beberapa simpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Laporan Keuangan yang disajikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman, Laporan realisasi anggaran-nya hendaknya dapat direalisasikan sebesar

- 100%, dan untuk kegiatan yang tidak dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditentukan, hendaknya untuk tahun anggaran selanjutnya, direncanakan kegiatan tersebut dipindahkan anggarannya kepada kegiatan lain agar Anggaran yang diberikan pemerintah dapat terealisasi 100%. Dan untuk Laporan Neraca masalah kecil lainnya yang ditemui adalah pengendapan di kas bendahara pengeluaran, yang disebabkan sistem yang sibuk pada akhir tahun, untuk itu hendaknya bendahara pengeluaran lebih meningkatkan kinerjanya, sehingga tidak ada lagi kas yang tidak dapat dcaikan pada akhir tahun.
2. Untuk analisis rasio yang digunakan dalam laporan keuangan dinas pendidikan hendaknya untuk Rasio Pertumbuhan anggaran, hendaknya untuk tahun anggaran selanjutnya mengalami peningkatan yang lebih signifikan.
 3. Diharapkan agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman dapat mempertahankan dan meningkatkan dalam system pengendalian internnya agar kinerja laporan keuangan untuk tahun 2017 dapat terealisasi dengan baik, sehingga untuk tahun 2017 Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian kembali, terus berupaya menghasilkan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan kehendak masyarakat serta terwujudnya pemerintahan yang bebas KKN.
 4. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik dan berkualitas sesuai dengan yang tercantum dalam PP No. 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebaiknya lebih banyak mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis terhadap pegawai dan staf yang bertugas dalam pembuatan laporan keuangan khususnya di bidang akuntansi agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki sehingga akan berdampak positif pada laporan keuangan yang akan dihasilkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Syafarudin. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi kedua. Yogyakarta. BPFE UGM.
- Bastian, Indra. (2005). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta. Salemba Empat.
- Kuncoro, Mudrajat. 2001. *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta. UPP-AMP YKPN.
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Andi Offset.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Strauss, A. dan Corbin, J. 2009. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Sedarmayanti. (2007). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung. Mandar Maju.
- Tanjung, Abdul Halim. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta

Wilopo. 2006. Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi IX: Padang*. 23-26 Agustus 2006